

# Dramaturgi Partai Hadapi Pilkada

## Kegalauan PDIP, Retaknya PKS hingga Seteru PKB-NU

**G**enderang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 mulai ditabuh. Pendaftaran calon kepala daerah resmi dibuka, Selasa (27/8/2024). Hari pertama selama ini memang bukan waktu favorit untuk mendaftar para calon, sehingga KPU di berbagai daerah masih sepi. Tapi, suasana gaduh dengan dramaturgi tersaji di 'rumah' para partai politik (parpol). PDI Perjuangan (PDIP) sebagai partai dengan suara terbesar tampak masih galau dengan jagoan yang akan diusung, terutama di DKI Jakarta. Nama Anies Baswedan yang melesat di 'kandang banteng' sepekan ini tampaknya terganjal. Kabarnya, DPP PDIP akan mengusung Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada DKI Jakarta 2024. Namun karena politik sangat dinamis, bisa jadi bakal berubah lagi di detik-detik akhir. Sementara di Jawa Timur, nama yang digadang-gadang adalah Menteri Sosial, Tri Rismaharini. Sementara di internal PKS, juga sedang terjadi perpecahan keluarga. Sebanyak 28 anggota Dewan Pakar PKS mengumumkan mengundurkan diri sebagai kader. Salah satu alasannya, karena PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dianggap mengikuti Pilpres 2024 dengan curang. Tak jauh berbeda suasana panas juga terjadi di tubuh PKB yang sedang berseteru dengan PBNU. Muktamar tandingan akan digelar 2-3 September dan mendorong Yenny Wahid hingga Khofifah untuk maju sebagai Ketua Umum. Diketahui, di muktamar Bali, Muhaimin Iskandar terpilih lagi menjadi Ketua Umum PKB periode 2024-2029.

Baca Hal 11....



## PERUBAHAN AMBANG BATAS PENCALONAN DALAM PILKADA

### DASAR HUKUM

**ATURAN LAMA:**  
Undang-Undang Nomer 10  
Tahun 2016

**ATURAN BARU:**  
Putusan MK 60/PUU-XXII/2024

### AMBANG BATAS

**ATURAN LAMA:**  
- 20% Jumlah kursi DPRD ATAU ;  
- 25% Jumlah suara sah

**ATURAN BARU:**  
**Gubernur**  
- 10% jumlah DPT < 2 juta  
- 8,5% jumlah DPT 2-6 juta  
- 7,5% jumlah DPT 6-12 juta  
- 6,5% jumlah DPT >12 juta

**Wali kota/Bupati**  
- 10% jumlah DPT < 250 ribu  
- 8,5% jumlah DPT 250-500 ribu  
- 7,5% jumlah DPT 500 ribu-1 juta  
- 6,5% jumlah DPT >1 juta

Persentase berdasarkan  
jumlahsuara sah saat pemilu  
DPRD 2024

**GOVERNMENT (Hal.2)**  
**Menteri Bahilil**  
**Konfirmasi Rencana**  
**Batasi Pembelian**  
**BBM Subsidi**  
**Per 1 Oktober**

# Menteri Bahlil Konfirmasi Rencana Batasi Pembelian BBM Subsidi Per 1 Oktober



## ASUMSI SEKTOR ESDM DALAM RAPBN 2025 YANG DISEPAKATI KOMISI VII DAN MENTERI ESDM:

1. Indonesian Crude Price (ICP):  
**US\$ 82 per barel**

2. Lifting migas:  
**1,610 juta barel setara minyak per hari (boepd)**

-Lifting minyak bumi:  
**605 ribu barel per hari (bopd)**

-Lifting gas bumi:  
**1,005 juta boepd**

-Cost recovery:  
**US\$ 8,5 miliar**

3. Volume BBM bersubsidi:  
**19,41 juta KL**

- Minyak tanah:  
**0,52 juta KL**

- Minyak solar:  
**18,89 juta KL**

4. Volume LPG 3 kg:  
**8,2 juta metrik ton**

5. Subsidi tetap minyak solar:  
**Rp 1.000 per liter**

6. Subsidi listrik:  
**Rp 90,22 triliun.**



Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (tengah), Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana (kiri), mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024). (ist)

waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang lagi dibahas," ujar Bahlil. Ia tidak puas dengan kriteria penerima subsidi BBM yang akan diberlakukan.

Seiring dengan rencana tersebut, Bahlil juga meminta agar pengguna kendaraan mewah berhenti menggunakan subsidi BBM. Harapannya agar penyaluran BBM bersubsidi bisa tepat sasaran dan menciptakan efisiensi.

"Yang berhak menerima subsidi itu kan masyarakat yang golongan ekonomi menengah ke bawah. Kalau kayak kita masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia?" ucap Ketua Umum Partai Golkar itu.

Wacana mengambil pembelian BBM bersubsidi sempat menjadi pembahasan beberapa bulan terakhir. Mulanya, isu ini berhembus setelah disinggung Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Juli lalu, Luhut mengatakan pemerintah tengah membereskan masalah pemborosan anggaran yang terjadi di Indonesia. Salah satu yang dilakukan pemerintah adalah dengan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan mobil sekelas Fortuner dan Pajero merupakan mobil 'bagus'. Sehingga ia mempertanyakan kelayakan BBM Solar subsidi untuk dipakai pada mobil tersebut.

"Kira-kira layak enggak ya dia (Pajero dan Fortuner)? Sepertinya mobilnya juga kan bagus," kata Dadan Saat ditanya kepastian apakah mobil sekelas Pajero dan Fortuner apakah

sudah tidak bisa lagi membeli Solar subsidi, saat ditemui di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa (13/8/2024).

Dadan menegaskan pemerintah akan mempertajam kriteria pengguna BBM bersubsidi. Karena itu, pihaknya tengah menyiapkan berbagai program untuk mensosialisasikan aturan terbaru yang akan dirilis oleh pemerintah.

"Iya (kriteria pengguna BBM subsidi) lagi dibahas, sudah hampir selesai sih pembahasannya. Kan udah dibahas di rakor Menko (Bidang Perekonomian), waktu itu Pak Menko (Airlangga Hartarto) sudah memberikan penjelasan," imbuhnya.

Target Lifting Minyak & Volume LPG 3 Kg

Diketahui, Rapat kerja antara Komisi VII DPR dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membahas asumsi dasar sektor ESDM dalam RUU APBN 2025 menyepakati beberapa hal. Salah satunya menaikkan target lifting minyak dari yang diusulkan 600 ribu barel per hari (bopd) menjadi 605 ribu bopd.

Kesimpulan rapat dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman. "Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM terkait asumsi dasar sektor ESDM RAPBN Tahun 2025 sebagai berikut," katanya di Komisi VII, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Rapat juga menyepakati kenaikan volume LPG 3 kg dari usulan 8,17 juta metrik ton menjadi 8,2 juta metrik ton.

Kesimpulan selanjutnya, Komisi VII memahami penjelasan Menteri ESDM terkait pagu anggaran Kementerian ESDM tahun 2025 sebesar Rp 10.884.702.389.000 yang

didapat dari rupiah murni dan PNB sektor minerba dan migas serta akan didalami dengan seluruh eselon I Kementerian ESDM.

Terkait subsidi LPG, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan hal ini didorong oleh peningkatan permintaan dari masyarakat.

"Peningkatan ini didorong oleh permintaan LPG (3kg) dari masyarakat. Jadi permintaan tinggi terus," terang Bahlil dalam Rapat Kerja RAPBN 2025 Kementerian ESDM dengan Komisi VII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Bahlil melanjutkan, saat ini pemerintah sedang berupaya untuk membangun industri jaringan gas LPG di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian ESDM, anggaran APBN sejak 2009-2023 telah membangun jargas sebanyak 703.308 Sambungan Rumah (SR).

Salah satu kota yang menikmati Jargas adalah Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dengan total jumlah sebanyak 28.466 SR. "Memang selain LPG bersubsidi kita juga lagi berpikir untuk bagaimana bikin jaringan gas atau jargas dan membangun industri LPG di Indonesia," imbuh Bahlil.

Sementara, untuk listrik Bahlil menjelaskan peningkatan jatah anggaran subsidi didorong oleh perkiraan peningkatan pelanggan. "Didorong oleh perkiraan jumlah penerima subsidi listrik dari 40,89 juta pelanggan menjadi 42,08 juta pelanggan di 2025. Jadi naiknya kurang lebih sekitar 1 juta lebih pelanggan itu bisa berdampak pada kenaikan," tutup Bahlil. (tro, wid, rls/dya)

**JAKARTA** - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia blak-blakan soal rencana pembelian bahan bakar minyak atau subsidi BBM. Ia mengkonfirmasi adanya rencana stimulus mulai 1 Oktober 2024.

"Memang ada rencana begitu," kata Bahlil ketika ditemui wartawan usai rapat kerja bersama Komisi VII di Gedung DPR RI, Selasa, (27/8/2024).

Menurut Bahlil, penerapan subsidi BBM itu akan diterapkan setelah aturan diterbitkan. Sebaliknya aturan itu berupa Peraturan Menteri (Permen) ESDM, bukan dalam revisi Perpres 191 Tahun 2024 yang hingga kini belum terselesaikan.

"Begitu aturannya keluar, kan ada

# Kritik Tajam DPR Temukan Anggaran Pendidikan Baru Terserap 16%

**JAKARTA-** DPR RI mengkritisi realisasi anggaran pendidikan yang hanya terserap 16 persen dari pagu Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dolfie OFP mengatakan konstitusi telah mengamanatkan bahwa alokasi anggaran untuk sektor pendidikan yaitu sebesar 20 persen. Dia pun mempertanyakan hal tersebut karena nilai yang tak terealisasi yakni sebesar Rp111 triliun.

"Nilai 4 persen yang tidak terealisasi mencapai Rp111 triliun, yang seharusnya dapat digunakan untuk meringankan rakyat memperoleh layanan pendidikan di semua tingkatan, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi," kata Dolfie dikutip dari Antara, Selasa (27/8/2024).

Selain itu, dia menilai bahwa anggaran 4 persen yang tidak terserap juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa kurang beruntung di sejumlah perguruan tinggi.

"Capaian realisasi pelaksanaan anggaran pendidikan yang hanya 16 persen telah menghilangkan hak konstitusional rakyat memperoleh pendidikan yang baik," katanya.

Sementara itu, Anggota Banggar DPR RI Ecky Awal Mucharam mengatakan serapan anggaran yang kurang maksimal bisa dimaknai sebagai pelanggaran konstitusi, sehingga dia pun meminta agar ke depannya serapan anggaran sektor pendidikan diperbaiki.

"Komitmen pemerintah hanya sebatas penganggaran agar mencapai 20 persen, sedangkan komitmen realisasinya masih belum. Hal ini dapat dianggap tidak sesuai konstitusi," kata Ecky.

**Prioritas 2025:**

**Kesejahteraan Guru- Bantuan PIP**  
Sebelumnya Kementerian



Pelajar di Kampung Cigirang, Desa Neglasari, Kecamatan Lengkon, Kabupaten Sukabumi harus bergelantungan melalui jembatan rusak untuk pergi ke sekolah.ist

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan mengalokasikan pagu anggaran 2025 untuk fokus memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan guru ataupun tenaga pendidik. Adapun anggaran pendidikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mencapai Rp 722 triliun.

Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan sekitar 11 persen dari total alokasi anggaran pada RAPBN 2025 atau senilai Rp 83,19 triliun akan difokuskan untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan.

"Yang utamanya untuk pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga pendidik, serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan mereka," ungkap Nadiem dalam konferensi pers RAPBN serta nota keuangan 2025 pekan lalu.

Sementara, untuk prioritas kedua adalah peningkatan layanan pendidikan dan beberapa program unggulan Kemendikbudristek, misalnya Program Indonesia Pintar (PIP) dan Beasiswa Afirmasi untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Kemudian untuk program prioritas ketiga akan fokus pada

peningkatan kualitas relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, tak terkecuali melalui perbaikan program Kampus Merdeka.

Kemendikbudristek juga akan memprioritaskan pada peningkatan kualitas pendidikan vokasi, seperti program SMK Pusat Keunggulan.

Terakhir, program prioritasnya adalah kemajuan kebudayaan, bahasa, dan sastra. Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2025 dan nota keuangan pada sidang paripurna DPR RI tahun sidang 2024-2025 mengatakan, total alokasi anggaran pendidikan Rp 722,6 triliun yang akan dialokasikan untuk sejumlah program prioritas presiden terpilih.

Beberapa program yang dimaksud di antaranya peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, juga pengembangan sekolah unggulan. Di samping itu, anggaran pendidikan juga akan digunakan untuk perluasan beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dana tersebut akan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan, melalui berbagai instrumen yang telah ada

seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), PAUD, beasiswa, hingga Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Selain program-program yang telah ada, pemerintah juga akan meluncurkan program baru yang sejalan dengan visi presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni penyediaan makanan bergizi untuk anak-anak sekolah. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan serta konsentrasi belajar siswa di seluruh Indonesia

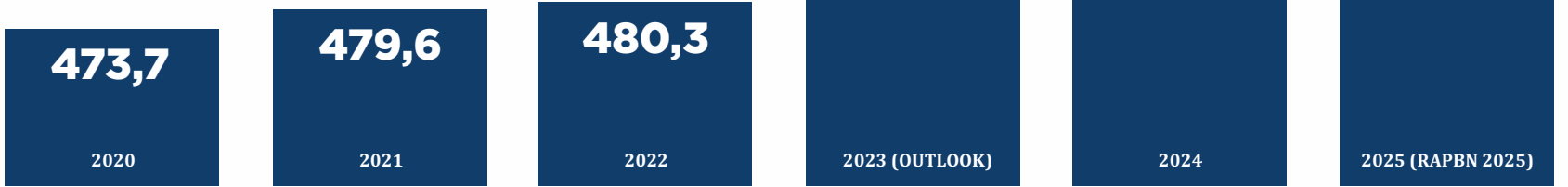
Tidak hanya itu, pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan renovasi besar-besaran terhadap sekolah-sekolah yang kondisinya tidak layak. Fokus utamanya adalah memperbaiki kelas dan gedung sekolah yang rusak serta membangun sekolah-sekolah unggulan yang dapat menjadi pusat pendidikan berkualitas di berbagai daerah

"Pemerintahan presiden terpilih akan memperhatikan renovasi sekolah-sekolah yang buruk dan pembangunan sekolah-sekolah unggulan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia," tambah Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/24).

Sesuai dengan arah kebijakan pendidikan yang menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, pemerintah juga telah memasukkan program link and match ke dalam anggaran. Program ini akan didorong melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi keterampilan yang relevan dengan pasar tenaga kerja.

"Anggaran pendidikan 2025 juga mencakup program-program pendidikan vokasi dan sertifikasi yang bertujuan untuk memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dengan pasar tenaga kerja," tutup dia. (tro,ant,rls/dya)

●●●  
**ANGGARAN PENDIDIKAN DI APBN (RP TRILIUN)**



# Muhammadiyah Tunggu Izin Tambang Pemberian Pemerintah

**JAKARTA** - Pimpinan Pusat Muhammadiyah sampai saat ini masih menunggu lokasi tambang yang akan diberikan pemerintah kepada mereka. Lokasi tambang tersebut merupakan bagian dari keputusan Presiden Joko Widodo yang memberikan penge-lolaan izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan.

"Sekarang kami belum tahu lokasinya di mana. Dari lokasi dan alokasinya berapa dan di mana, kami belum tahu," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti di Jakarta, Selasa, (27/8/2024).

Pernyataan Mu'ti tersebut menanggapi penjelasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Senin lalu. Bahlil mengatakan organisasi keagamaan Muhammadiyah segera mendapatkan tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk atau milik PT Arutmin Indonesia.

"Kemungkinan besar eks Adaro atau eks Arutmin," kata Bahlil.

Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan dirinya sudah memberikan disposisi untuk ditindak-lanjuti dan akan menginformasikan lebih lanjut perkembangannya ke depan. Ia mengatakan area tambang yang hendak diberikan kepada Muhammadiyah tersebut cukup luas, serta memiliki cadangan yang sesuai.

Saat dikonfirmasi, Mu'ti menegaskan bahwa pihaknya belum mendapatkan IUP tersebut. Izin tersebut akan menjadi landasan Muhammadiyah dalam mengelola pertambangan nantinya.

Saat ini, kata Mu'ti, Muhammadiyah tengah bersiap serta terus berdiskusi dengan para ahli agar berbagai dampak lingkungan dan dampak sosial dapat diantisipasi sejak awal. "Jadi, Muhammadiyah tentu yang sekarang kami lakukan adalah menyiapkan dengan sebaik-baiknya agar berbagai dampak lingkungan dan dampak sosial yang menjadi konsekuensi dari pertambangan itu dapat kami antisipasi dari awal," kata dia. "Dan kita bisa meminimalkan tingkat kerusakan lingkungan akibat dari pertambangan," kata Mu'ti.

Selain Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama lebih dulu mendapatkan pengelolaan izin pertambangan dari pemerintah. Kamis pekan lalu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staqif mengatakan pihaknya mendapat IUP bekas milik PT Kaltim Prima Coal di Kalimantan Timur seluas 26 ribu hektare.



(ilustrasi) Muhammadiyah bakal kelola tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk. (1st)

## Tambang Bekas Banyak Masalah

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas menyebut lahan-lahan tambang bekas yang kemungkinan diberikan pemerintah berpotensi menyimpan banyak masalah dalam pengelolaan sebelumnya.

Oleh karena itu, sambungnya, Muhammadiyah bisa saja mengembalikan izin tambang yang diberikan pemerintah kelak.

Persoalan di lahan-lahan bekas tambang itu diungkap Busyro berkaca pada pengalamannya sebagai salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat berada di lembaga antirasuah itu, Busyro mengaku menemukan banyak sekali permasalahan terkait lahan tambang ini.

"Oh jelas (banyak masalah di lahan bekas), kami waktu empat tahun di KPK itu antaranya menekuni sektor tambang tidak hanya batu bara," kata Busyro ditemui di UGM, Sleman, DIY, Senin (26/8/2024).

## Persoalan tambang yang ditemukan Busyro

Masalah yang dimaksud Busyro bukan cuma pada status lahan menyangkut aspek lingkungan, sosial, dan lain sebagainya, tapi juga dari sisi pengelolaannya.

Salah satu permasalahan yang ia soroti adalah suap dalam kasus penyelundupan tambang batu bara melalui pelabuhan tikus yang jumlahnya mencapai seribu titik. Muhammadiyah, tegasnya, tak ingin terlibat dalam praktik semacam ini.

"Di pelabuhan tikus itu proses-proses pengangkutan batu bara itu tidak fair, tidak fair itu artinya penuh dengan suap. Muhammadiyah tidak mungkin main suap," ucapnya.

Oleh karenanya, ia meminta PP Muhammadiyah melalui tim

pengelola tambang organisasinya agar cermat dengan tawaran pemerintah yang akan memberikan lahan tambang bekas.

Menurutnya, tak menutup peluang bagi Muhammadiyah untuk mengembalikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada pemerintah manakala lahan yang diberikan nantinya ditemukan masalah, sekalipun itu masih bersifat indikasi.

"Tinggal nanti kalau hasil timnya menemukan hitungan-hitungan di lapangan itu lebih banyak mudaratnya itu ada klausul yang diambil dalam kebijakan PP ini untuk dikembalikan," tutur dia.

"Jadi tidak akan memaksakan, dan dengan dikembalikan itu Muhammadiyah insyaallah bisa tetap membiayai gerakan-gerakannya seperti selama ini tidak akan kekurangan apalagi miskin," sambung akademisi dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tersebut.

Sebelumnya, pemerintahan Jokowi mengeluarkan kebijakan pemberian izin tambang bagi ormas keagamaan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara.

Lewat aturan ini, ormas keagamaan dapat diprioritaskan sebagai penerima penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) eks Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B).

Sudah ada tiga ormas Islam yang memutuskan ingin menerima izin tambang dari pemerintah. Mereka adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan PP Persatuan Islam (Persis).(tro,ist,ant/dya)

## Lahan tambang yang akan diberikan:

-  PT Kaltim Prima Coal (KPC),
-  PT Arutmin Indonesia,
-  PT Kendilo Coal Indonesia,
-  PT Adaro Energy Tbk,
-  PT Multi Harapan Utama (MAU),
-  PT Kideco Jaya Agung.

## Lahan itu dialokasikan kepada enam ormas agama:

- Nahdlatul Ulama (NU),
- Muhammadiyah,
- Kristen (Persatuan Gereja Indonesia),
- Katolik (Kantor Waligereja Indonesia),
- Hindu,
- Buddha.

## Payung Hukum Ormas Agama Kelola Tambang

(PP Nomor 25 Tahun 2024)

### DETIL PERATURAN

Aturan mengenai IUP itu tertuang dalam pasal 83A, yang kisi-kisinya sebagai berikut:

**Ayat 1:** Memberikan jatah izin tambang WIUPK pada ormas lewat badan usaha yang dimiliki oleh ormas tersebut. Wilayah yang dimaksud di sini adalah wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara atau PKP2B.

**Ayat 3:** IUPK dan/atau kepemilikan saham badan usaha ormas yang mengelola WIUPK tidak bisa dialihkan tanpa persetujuan menteri.

**Ayat 4:** Kepemilikan saham ormas keagamaan dan badan usaha ormas tersebut harus mayoritas dan menjadi saham pengendali.

**Ayat 5:** Badan usaha ormas tidak diperbolehkan bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya maupun organisasi apapun yang merupakan afiliasinya.

# #DaruratKekerasanAparat Mengggaung Jokowi Minta Polri Bebaskan Seluruh Pendemo RUU Pilkada

## Bolehkah Polisi Lempar Gas Air Mata dan Pakai Kekerasan?

Polisi mengatur pengamanan demo dalam Perkapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan, Pelayanan, dan Penanganan Penyampaian Pendapat di Muka Umum, serta Perkapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas).

## Melindungi Hak Asasi Manusia

- Melindungi hak asasi manusia;
- Menghargai asas legalitas;
- Menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- Menyelenggarakan pengamanan.

## Penindakan Tegas Massa Aksi

Penindakan tegas massa aksi yang anarkis dapat dilakukan dengan menangkap dan diperlakukan secara manusiawi.

- Peserta yang taat hukum harus mendapatkan perlindungan hukum.
- Pelaku pelanggaran hukum harus dikenai tindakan tegas dan proporsional.
- Pelaku anarkis harus ditindak tegas, ditangkap, dan dihentikan tindakannya.
- Pelaku pelanggaran yang ditangkap harus diperlakukan secara manusiawi.

## Pemukulan Massa Aksi

Pasal 24 Perkapolri 9/2008 menyatakan bahwa upaya paksa harus dihindari dari hal-hal yang kontra produktif. misalnya:

- Tindakan spontan dan emosional, seperti mengejar, membalas lemparan, atau menangkap dengan kasar.
- Keluar dari formasi dan mengejar massa secara perorangan.
- Tidak patuh pada perintah kepala satuan lapangan.
- Melampaui kewenangan.
- Melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, atau pelanggaran HAM.
- Melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang.



Massa melakukan aksi teatrikal menggantung boneka bertopeng mirip Jokowi di depan Istana Negara Gedung Agung Yogyakarta, Selasa (27/8/2024).ist

ditangkap polisi.

Dia meminta pendemo yang ditahan untuk dibebaskan. "Untuk pendemo yang masih ditahan, saya harap bisa segera dibebaskan," kata Jokowi dalam keterangannya, Selasa (27/8/2025).

Jokowi mengaku, dirinya tidak melarang dan memperlakukan demo yang dilakukan mahasiswa hingga para akademisi.

"Saya sangat menghargai itu, saya sangat menghormati itu, dan saya titip hanya saya titip mohon penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara yang tertib dan damai sehingga tidak merugikan, tidak mengganggu aktivitas warga dan lainnya," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga mengapresiasi langkah kilat DPR mengebuk revisi Undang-Undang Pilkada. Meskipun Revisi UU Pilkada itu batal di tengah sorotan publik yang kuat untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilihan kepala daerah.

Jokowi menyebut langkah cepat DPR yang merespons dinamika yang ada merupakan hal yang baik. Kepala negara mengharapkan ini bisa diterapkan untuk proses pembuatan undang-undang yang lain.

"Misalnya seperti Rancangan Undang-Undang perampasan aset yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita," ucapnya.

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Surat Presiden untuk RUU Perampasan Aset ini sejatinya telah diserahkan ke DPR pada 4 Mei 2023. Sejumlah pokok RUU Perampasan Aset ini belum pasti.

Salah satunya mengenai lembaga mana yang akan mengelola aset hasil rampasan. Namun disebut ada tiga lembaga yang memiliki instansi

pengelolaan aset, yaitu Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM.

## Aparat Dinilai Melanggar HAM

Aksi unjuk rasa Jateng Bergerak Adili dan Turunkan Jokowi di depan kompleks Balai Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Semarang, Jawa Tengah, yang dibubarkan polisi pada Senin, (26/8/2024), menelan banyak korban.

Berdasarkan data sementara, sebanyak 33 demonstran dirawat di rumah sakit. Selain itu, puluhan demonstran ditangkap. Saat pembubaran, massa mengalami sesak napas, pingsan, dan luka bocor di kepala.

Komnas HAM pun mencatat aparat keamanan telah menggunakan gas air mata, melakukan penangkapan terhadap peserta aksi.

Tak hanya itu, aparat diduga melakukan sweeping hingga masuk ke area mal atau pusat perbelanjaan. Oleh sebab itu, Komnas HAM mendesak Kapolda Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan melakukan evaluasi.

Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiuro melalui keterangan tertulis menyatakan penggunaan kekuatan berlebih dan/atau kekerasan dalam menangani aksi demonstrasi berisiko melanggar HAM.

Khususnya, kata Atnike, pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan juga hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin konstitusi dan UU HAM.

"Komnas HAM mendesak Kapolda Jawa Tengah dan Kapolda Sulawesi Selatan untuk melakukan evaluasi atas dugaan penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan dalam menangani dan membubarkan aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat umum," kata Atnike.

"Komnas HAM mendesak aparat keamanan untuk tidak menggunakan tindakan kekerasan dalam menjaga keamanan, dan justru mendekati pendekatan yang lebih humanis dan terukur dalam penanganan aksi demonstrasi."

Dalam keterangan tertulis, mereka juga menyoroti adanya penangkapan terhadap peserta aksi. Komnas HAM menuntut kepastian akses bantuan hukum terhadap para peserta aksi dan menekankan upaya menghalangi itu adalah bentuk pelanggaran HAM.

"Komnas HAM mendesak aparat penegak hukum untuk memberikan hak atas akses bantuan hukum bagi peserta aksi yang ditangkap. Menghalangi warga untuk mendapatkan akses bantuan hukum berisiko melanggar HAM, yakni hak atas keadilan," bunyi pernyataan itu.

Di sisi lain, Komnas HAM juga meminta semua pihak menggunakan hak asasinya untuk berkumpul dan berpendapat secara bertanggung jawab.

"Serta menjaga agar situasi keamanan tetap kondusif, untuk merawat ruang demokrasi bangsa baik saat ini maupun di masa depan."

Pernyataan itu menyusul Gerakan rakyat menggugat (GERAM) yang mengungkap dugaan upaya represif aparat terhadap peserta demo di Semarang yang membuat pedemo mundur hingga masuk Mal Paragon.

Tak hanya itu, peserta aksi yang dibawa ke Polrestaes Semarang disebut belum mendapatkan akses bantuan hukum dengan alasan yang tidak jelas.

Diketahui, massa masih tutun ke jalan di beberapa lokasi. Aksi teatrikal mewarnai 'Jogja Memanggil' di depan Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung, Selasa (27/8/2024).

Aksi teatrikal pertama dimulai dengan sebuah boneka Jokowi digantung oleh demonstran.

"Gantung Jokowi, gantung Jokowi," teriak massa aksi.

Aksi teatrikal ini sebagai bentuk kekecewaan massa aksi kepada Jokowi. Di akhir pemerintahannya Jokowi dinilai terus-terusan membatat demokrasi. Selanjutnya, demonstran bertopeng memerankan Prabowo Subianto. Dalam aksi itu diperagakan Prabowo dipenggal menggunakan guillotine atau alat pancung.

"Prabowo akan dilantik dan jelas akan melanjutkan parade penindasan kepada rakyat," katanya.

"Adili ganyang Prabowo di sini," ujar massa aksi. (tro,rks,ant,kum/dya)

**JAKARTA-** Gaung 'Peringatan Darurat' di media sosial maupun dunia nyata berlanjut. Terbaru #DaruratKekerasanAparat menjadi trending utama di medsos X buntut dari kekerasan aparat, terutama polisi dalam mengamankan aksi demonstrasi. Bahkan diketahui puluhan massa yang ikut aksi hingga kini masih ditahan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara menanggapi aksi demo penolakan RUU Pilkada yang masif terjadi di berbagai daerah dalam sepekan terakhir.

Diketahui, aksi demo ada yang berujung ricuh. Seperti demo di DPR RI hingga di Bandung dan Semarang. Beberapa pendemo ada yang

# Pastikan Tepat Sasaran, Pj Wali Kota Batu Tinjau Langsung 260 Rumah Warga Prasejahtera

**BATU** - Hingga pertengahan tahun 2024, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, telah meninjau langsung 260 rumah warga prasejahtera di berbagai desa dan kelurahan di Kota Batu. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah setempat, untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.

"Kunjungan ini tidak hanya untuk memberikan bantuan materiil, tetapi juga untuk mendengarkan langsung keluhan dan kebutuhan warga. Dengan turun langsung ke lapangan, kami berharap dapat merancang kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat," ujar Aries, Selasa (27/8/2024).

Menurut Aries, program inijuga telah tertuang dalam agenda Dinas Sosial Kota Batu, termasuk dengan menyalurkan bantuan kepada warga lansia dan penyandang disabilitas.

"Baru-baru ini, kami juga sudah mengunjungi Kelurahan Ngaglik, Temas, dan Sisir. Ada sebanyak 241 lansia dan 154 disabilitas menerima insentif sebesar Rp 1,5 juta per triwulan. Dengan total bantuan mencapai Rp 6 juta per tahun untuk

setiap penerima," paparnya.

Aries kembali menekankan, bantuan sosial ini tidak hanya sekadar distribusi dana, tetapi juga merupakan bagian dari upaya memperbaiki kualitas hidup warga prasejahtera.

"Karena kita harus memastikan bahwa mereka tidak merasa sendiri dalam menghadapi kesulitan hidup. Jadi kami selain tentunya memberikan bantuan materi, tetapi juga memberi semangat, berbincang langsung," tambahnya.

Aries mengharapkan, tidak ada satu pun warga prasejahtera yang luput dari perhatian pemerintah. Dikatakannya, dari total 19 desa dan 5 kelurahan di Kota Batu, Aries telah mengunjungi hampir keseluruhan, memastikan bahwa bantuan pemerintah menjangkau semua yang membutuhkan.

Lebih lanjut, Aries mengklaim upaya ini telah menunjukkan hasil yang signifikan. Menurutnya, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu, angka kemiskinan di Kota Batu mengalami penurunan.

Pada Maret 2023, sambunginya, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 3,31 persen, sementara pada



Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai saat meninjau salah satu rumah warga prasejahtera di Kota Batu. (dok. Prokopim Kota Batu)

Maret 2024, angka ini turun menjadi 3,06 persen. "Penurunan sebesar 0,25 persen ini menjadi bukti bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Batu berada di jalur yang benar," jelasnya.

Dalam kesempatannya ini, Aries juga mengajak seluruh jajaran

pemerintahan dan masyarakat untuk bersama-sama bekerja keras dalam mengatasi kemiskinan di Kota Batu. "Penurunan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama. Kita harus bergerak bersama-sama," tegasnya. (Santi/Dya)

## Dibutuhkan Rp 500 M untuk Rehab Pasar Besar



Kondisi zona sayur mayur di Pasar Besar Kota Malang, Selasa (27/8/2024). (Santi/Lenteratoday)

**MALANG** - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tengah menggenjot persiapan untuk mengajukan usulan rehabilitasi Pasar Besar ke pemerintah pusat. Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, bersama jajarannya kini bekerja maraton untuk menyiapkan materi proposal.

Harapannya bisa mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 500 miliar dari Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Pasar Besar ini kemungkinan pendanaannya kami minta ke pemerintah pusat. Karena memang cukup besar anggarannya. Rp 400-500 miliar kalau berdasarkan DED Feasibility Study (FS) yang telah disusun oleh Pak Kadiskopindag," ujar Pj Iwan, ditemui usai meninjau Pasar Besar Kota Malang, Selasa

(27/8/2024).

Dalam kunjungannya ke Pasar Besar, Iwan melihat secara langsung kondisi pasar yang memang sudah memerlukan perbaikan segera. Ia mengungkapkan, beberapa masalah prioritas harus segera ditangani, seperti seringnya terjadi banjir di zona sayur, banyaknya saluran pipa air yang sudah tidak layak.

"Kemudian listrik juga menjadi kendala di sini. Karena kan sudah resmi lepas kontrak dari PT Matahari. Jadi pedagang kadang juga tidak menggunakan listrik, sehingga cukup gelap. Selain itu, pengolahan limbahnya juga perlu menjadi perhatian," jelasnya.

Iwan juga menyadari, masa jabatannya sebagai Pj Wali Kota Malang terbatas, sehingga ia ingin memastikan upaya percepatan ini tidak berlarut-larut. "Mudah-mudahan, saya akan ke sana (KemenPUPR). Tapi saya minta Pak Sekda, Bu Asisten II, Pak Kadiskopindag, untuk meruntutkan dulu materi kita. Materinya harus

meyakinkan, itu dulu yang akan saya kejar. Setelah ini saya akan minta untuk maraton menyiapkan materinya," tambahnya.

Lebih lanjut, terkait dengan alokasi anggaran, Iwan menyatakan optimismenya bahwa usulan ini dapat masuk dalam prioritas anggaran 2025, sehingga pelaksanaan rehabilitasi dapat segera dimulai.

"Kami masih berharap untuk bisa mengawal, Januari atau sampai Desember 2025, sudah terplot di 2026. Artinya sudah diyakinkan bahwa alokasi untuk ini ada. Yang penting bagaimana kita bisa kawal ada alokasi anggaran di pemerintah pusat untuk Pasar Besar. Ini semua masih usaha," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menambahkan, persiapan tempat relokasi pedagang akan menunggu hasil koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian PUPR, untuk memastikan kelancaran proses rehabilitasi tanpa mengganggu aktivitas perdagangan di Pasar Besar. (Santi/Dya)

# Ravena Wulandari, Peserta Berjilbab di Babak Final MUI 2024

**DI ANTARA** 16 finalis kontes kecantikan Miss Universe Indonesia (MUI) 2024, Ravena Wulandari merupakan satu-satunya peserta yang mengenakan jilbab.

Dalam acara konferensi pers di Jakarta, Ravena mengaku bangga menjadi satu-satunya peserta berjilbab yang bisa melaju ke final perebutan mahkota Miss Universe Indonesia pada September 2024.

Keenam belas perempuan berbakat ini berhasil terpilih dari puluhan pendaftar dari seluruh Indonesia yang lolos syarat administratif.

Para finalis telah melalui seleksi ketat, baik penjurian offline dan juga online di mana proses pemilihan melibatkan dewan juri yang kompeten serta memiliki visi yang sama dengan Miss Universe.

Ravena berhasil masuk kelompok 30 besar dalam audisi langsung yang dilakukan oleh para juri di Jakarta dan kemudian terpilih menjadi satu dari 16 peserta yang masuk ke babak final MUI 2024.

Ia mengaku menghadapi beberapa tantangan selama mengikuti kontes Miss Universe Indonesia, antara lain dalam mempersiapkan busana untuk audisi.

"Dan juga persiapan lainnya untuk meningkatkan kepercayaan diri, (seperti) melatih public speaking dan juga olahraga untuk meningkatkan kepercayaan diri serta penampilan," katanya.

Namun, Ravena tetap optimistis karena merasa memiliki keunikan tersendiri.

"Kita bisa menunjukkan kelebihan kita melalui keunikan kita, hijab kita. Dan pastinya kita harus menjaga nama baik, agama kita juga," katanya.

Sesuai dengan aturan baru Miss Universe Global yang diterapkan mulai tahun ini, Komite Miss Universe Indonesia 2024 melakukan perubahan

kriteria peserta.

Perubahan kriteria peserta itu memungkinkan perempuan yang sudah menikah, memiliki anak, dan memakai jilbab mengikuti kontes Miss Universe Indonesia.

"Konsepnya diversity, kita ingin memberikan kesempatan kepada perempuan, siapa pun itu dengan status apa pun untuk ikuti ini, karena ini bukan hanya sekadar kontes atau ajang kecantikan saja," kata Teuku Jordan Zacky selaku Direktur Nasional Miss Universe Indonesia 2024.

"Ada beberapa yang memang mendaftar dan berhijab, cuma kan kita juga melihat dari semua aspek, dari profilnya, dari sosial medianya, dan lain-lain," katanya.

Penetapan finalis dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai pemberdayaan dan sportifitas, menekankan peran Miss Universe Indonesia 2024 sebagai platform global yang aman, adil, dan transparan bagi semua peserta.

Dipastikan audisi berlangsung dengan lancar, mengutamakan keamanan, kenyamanan, dan privasi setiap kontestan dengan tingkat profesionalisme yang tinggi.

Kontestan tidak hanya dinilai berdasarkan penampilan fisik, tetapi juga kecerdasan, advokasi sosial, dan kemampuan mereka untuk menjadi pemimpin yang inspiratif.

Ravena Wulandari adalah finalis asal Aceh yang sangat antusias mengikuti kontes kecantikan ini untuk menunjukkan identitas perempuan berhijab di kampung halamannya.

Dengan segudang kemampuan, Ravena merasa bisa bersaing dengan para kontestan yang lainnya.

"Saya dari Aceh, saya belum

menikah. Saya fleksibel woman, menjadi duta pariwisata, model dan artis di saat bersamaan," kata Ravena Wulandari.

Revena, sosok perempuan yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa tersebut berasal dari keluarga sederhana. Ibunda Ravena berstatus sebagai ibu rumah tangga, sementara sang ayah telah meninggal dunia.

Namun, kehilangan ayah dua tahun lalu tidak menyurutkan semangatnya. Ravena mengaku diantar oleh

salah satu desainer yang baik dari Aceh menuju panggung Miss Universe Indonesia 2024.

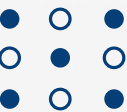
Tentu saja, penilaian untuk Miss Universe Indonesia ini bukan dilihat dari penampilannya saja. Setiap finalis harus memiliki core value beautiful confidence dan semangat empowering.

Penting juga bagi mereka untuk memprioritaskan nilai-nilai budaya bangsa dan mengintegritaskan teknologi digital agar tetap relevan di zaman sekarang (Antara)



Kita bisa menunjukkan kelebihan kita melalui keunikan kita, hijab kita. Dan pastinya kita harus menjaga nama baik, agama kita juga,"

**Ravena Wulandari**





# DOPAMINE DETOX : MENYEGARKAN OTAK DARI KECANDUAN RANGSANGAN OTAK

**DOPAMIN** adalah neurotransmitter. Neurotransmitter adalah pembawa pesan kimiawi yang digunakan oleh sistem saraf untuk mengirimkan perintah yang menjaga tubuh dan otak tetap berfungsi. Setiap neurotransmitter membawa berbagai jenis pesan dan fungsi berbeda yang membantu otak dan tubuh bersaing.

Dopamin adalah neurotransmitter *monoamina* yang membantu mengatur fungsi dasar tubuh tertentu seperti sirkulasi, pernapasan, dan gerakan, serta membantu suasana hati, motivasi, dan konsentrasi.

Dopamin memicu pusat kesenangan dan penghargaan di otak, sehingga dopamin dijuluki sebagai 'zat kimia kesenangan' di otak.

Aktivitas dan obat-obatan yang melepaskan sejumlah besar dopamin sekaligus dapat mengondisikan pusat penghargaan di otak, memotivasi orang untuk mengulangi perilaku ini.

Dalam kondisi ekstrem, hal ini dapat menyebabkan dorongan dan keinginan kuat yang dialami orang saat mereka menjadi kecanduan terhadap sesuatu. Dopamine detox adalah metode di mana kita membatasi atau menghentikan sementara aktivitas yang memberikan kesenangan instan.

Tujuannya adalah untuk mengatur ulang otak kita, agar bisa kembali fokus pada kegiatan yang lebih penting dan produktif tanpa selalu mencari kepuasan cepat.

## Mengapa Kita Butuh Dopamine Detox?

Otak kita dirancang untuk mencari kesenangan dan menghindari rasa tidak nyaman. Setiap kali kita melakukan aktivitas yang menyenangkan—seperti mengecek notifikasi di ponsel atau menonton video viral—otak kita melepaskan dopamin, hormon yang memberi rasa senang dan puas.

Masalahnya, kebiasaan menerima "reward" instan ini bisa membuat kita sulit menikmati hal-hal yang lebih membutuhkan usaha dan komitmen, seperti bekerja, belajar, atau bahkan berinteraksi dengan orang di sekitar.

Jika otak terus-menerus mendapat stimulasi dari aktivitas singkat ini, kita menjadi kurang peka terhadap kesenangan yang datang dari pencapaian yang lebih signifikan dan membutuhkan kerja keras. Inilah yang membuat banyak orang merasa perlu melakukan dopamine detox.

## CARA MELAKUKAN DOPAMINE DETOX

Meskipun terdengar rumit, dopamine detox sebenarnya mudah dilakukan jika dimulai dari hal-hal sederhana. Berikut beberapa langkah yang bisa kamu coba:

### 1. Hindari Media Sosial

untuk Sehari: Media sosial adalah salah satu sumber utama dopamin instan. Coba tahan diri untuk tidak mengecek Instagram, Twitter, TikTok,

atau platform lainnya selama satu hari penuh. Awalnya mungkin terasa sulit, tapi ini membantu kamu mengurangi kebiasaan mencari hiburan cepat.

### 2. Kurangi Konsumsi Cemilan Manis atau Junk Food

Makanan tinggi gula dan junk food memberikan "ledakan" dopamin yang membuat kita merasa senang, tapi efeknya cepat hilang dan sering diikuti oleh perasaan ingin makan lagi. Coba ganti dengan makanan yang lebih sehat seperti buah-buahan atau kacang-kacangan.

### 3. Gantikan Aktivitas Instan dengan yang Lebih Bermanfaat

Daripada menghabiskan waktu menonton video pendek yang viral, coba alihkan perhatian ke kegiatan yang membutuhkan fokus lebih, seperti membaca buku, menulis, atau berolahraga.

### 4. Ciptakan Momen "Jeda" dari Stimulasi Digital

Luangkan waktu sehari untuk benar-benar beristirahat dari segala bentuk teknologi, termasuk TV dan gadget. Kamu bisa mencoba meditasi, jalan-jalan di alam, atau sekadar menikmati waktu tenang tanpa gangguan.

### 5. Fokus pada hubungan sosial

Manfaatkan waktu untuk berinteraksi dengan teman, keluarga,

atau rekan kerja. Fokus pada hubungan sosial dapat memberikan pengalaman positif dan memperkuat koneksi emosional.

## MANFAAT DOPAMINE DETOX

Dopamine detox memang sedang populer di dunia kesehatan mental. Konsep ini telah menarik perhatian banyak orang yang mencari cara untuk mengatasi ketergantungan pada rangsangan sehari-hari, seperti media sosial, gula, atau kegiatan-kegiatan impulsif lainnya.

Meskipun popularitasnya meningkat, manfaat dopamine detox sebenarnya masih kontroversial dan tidak didukung sepenuhnya oleh bukti ilmiah. Salah satu klaim utama tindakan ini yaitu mengurangi respons otak terhadap kesenangan. Dopamin sendiri merupakan neurotransmitter yang terlibat dalam respons kenikmatan atau motivasi.

Orang yang mendukung tindakan ini berpendapat kalau mengurangi paparan terhadap stimulasi tersebut bisa menurunkan ketergantungan akan kenikmatan instan. Satu aspek yang perlu diperhatikan yaitu dopamine detox tidak seharusnya diartikan secara harfiah sebagai "membersihkan" atau "menghilangkan" dopamin dari tubuh secara total. Dopamin adalah neurotransmitter yang esensial untuk fungsi otak yang sehat. Menghentikan produksinya justru memiliki konsekuensi serius terhadap kesejahteraan mental dan fisik. (nei,ist/dya)



# Bocoran Spesifikasi Kamera Seri iPhone 16

**SERI** iPhone 16 terus menjadi sorotan akhir-akhir ini, dan kabar terbaru adalah adanya bocoran yang mengungkap spesifikasi kamera dari ponsel pintar akan datang ini.

Bersumber dari Apple Insider, yang dikutip dari Gizmochina, waktu setempat, iPhone 16 dan 16 Plus tampaknya hanya akan menerima peningkatan yang minimal.

Model-model ini akan tetap menggunakan sensor utama 48 megapiksel seperti pendahulunya, tetapi kamera ultrawide akan mengalami peningkatan pada aperture darif/2.4 menjadi f/2.2.

Yang menarik, bocoran ini menyebutkan bahwa model non-Pro ini akhirnya akan mendukung fotografi makro, sebuah fitur yang saat ini belum ada pada iPhone varian dasar.

iPhone 16 Pro dan Pro Max dikabarkan akan menerima pembaruan yang sedikit lebih signifikan. Kamera utama kemungkinan akan tetap sama seperti tahun lalu, namun kamera ultrawide diperkirakan akan mendapatkan peningkatan besar.

Resolusi kamera ultrawide akan meningkat dari 12 megapiksel menjadi 48 megapiksel. Kamera ini juga akan menggunakan pixel binning untuk mengambil gambar.

Setiap piksel akan berukuran 0,7 mikrometer, yang secara efektif akan menciptakan ukuran piksel 1,4 mikrometer saat menggunakan mode binning. Pengguna juga bisa mengambil foto 48 megapiksel dalam format gambar berkualitas tinggi Apple, ProRaw.

Selain peningkatan sensor, Apple juga dikatakan akan memperkenalkan format foto baru tahun ini, yaitu JPEG-XL, dan model Pro juga akan mendukung perekaman video 3K pada 120fps dengan Dolby Vision.

Salah satu tambahan yang diperkirakan hadir adalah tombol Capture pada keempat model iPhone 16.

Tombol ini akan bersifat kapasitif, artinya pengguna tidak perlu menekannya secara fisik untuk memicu suatu aksi, dan tombol ini akan eksklusif untuk aplikasi kamera, baik aplikasi Apple maupun opsi pihak ketiga.

Tombol ini juga akan mendukung setengah tekan yang sensitif terhadap tekanan, memungkinkan pengembang menggunakannya untuk fitur seperti mengunci pencahayaan dan fokus sebelum mengambil foto. Selain itu, sifat kapasitifnya memungkinkannya berfungsi sebagai trackpad.

## Kembangkan AI dan chip

Apple fokus mengembangkan artificial intelligence (AI/kecerdasan buatan) untuk ponsel iPhone 16, baik yang berbasis komputasi awan maupun yang berbasis perangkat.

Gizmochina melaporkan bahwa sebelumnya Apple mengembangkan AI on device, kecerdasan buatan berbasis perangkat, demi menjaga privasi pengguna. Mereka bahkan mengakuisisi perusahaan rintisan dari Prancis Datakalab supaya teknologi large language model (LLM) bisa bekerja lebih cakap dan efisien.

Namun, sejumlah fitur memerlukan pengerjaan melalui AI on cloud, kecerdasan buatan berbasis komputasi awan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Apple akan memasang Apple Silicon, chip seri M, pada server. Jurnalis Bloomberg Mark Gurman mengatakan penggunaan Apple Silicon pada server akan

dikhususkan untuk menangani tugas-tugas yang membutuhkan AI. Apple menggunakan chip M2 Ultra, yang menentagai Mac Pro dan Mac Studio rilis tahun lalu, di server AI-nya.

Perusahaan berbasis Cupertino itu juga dilaporkan berencana untuk menggunakan chip M4 baru yang dikenalkan di masa mendatang.

Selain menggunakan chip di atas, Apple dikabarkan sedang mengembangkan chip khusus untuk server AI yang menggunakan teknologi pemrosesan 3 nanometer dari TSMC. Chip itu diperkirakan akan diproduksi massal pada paruh kedua 2025.

Sumber yang terlibat dalam pengembangan chip menginformasikan bahwa chip tersebut memiliki komponen untuk melindungi privasi pengguna dan menggunakan metode yang disebut Secure Enclave untuk mengisolasi data dari kerentanan keamanan (Antara



# BI - IFC BAWA IN2MF KE PARIS : MEMPERKENALKAN MODEST FASHION INDONESIA

**MODEST** fashion, yang menekankan pada busana yang sopan dan stylish, semakin mendapatkan perhatian global. Indonesia, dengan kekayaan budaya dan kreativitas dalam fashionnya, menjadi salah satu pemain utama dalam tren ini.

Bank Indonesia (BI) bersama Indonesia Fashion Chamber (IFC) siap membawa Indonesian International Modest Fashion Festival (IN2MF) ke Paris, Prancis dalam ajang pameran di Salle Wagram pada 7 September 2024 dan trunk show "Who's Next" di Porte de Versailles pada 8-10 September 2024 menghadirkan ragam busana Muslim dari sejumlah desainer Indonesia.

Didukung oleh Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Paris, gelaran tersebut merupakan rangkaian dari puncak perhelatan IN2MF pada tanggal 30 Oktober - 4 November 2024 di Jakarta. IN2MF merupakan sebuah brand modest fashion yang telah dikenal luas di Indonesia.

Dengan desain yang elegan dan modern, IN2MF berhasil menggabungkan tradisi dan tren fashion saat ini. Dengan menghadirkan koleksi terbarunya di Paris Fashion Week, IN2MF berharap dapat menarik perhatian para pengamat fashion internasional dan membawa nama Indonesia di kancah fashion dunia.

"Nantinya, ada sembilan desainer Indonesia dan jenama yang akan memamerkan ragam koleksi busana tertutup (modest fashion) serta memadukannya dengan wastra khas Nusantara pada IN2MF di Paris, Prancis," kata Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Ita Rulina saat ditemui di

kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024).

"IN2MF itu potensinya sangat besar, kontribusi IN2MF adalah kita ingin memberikan kesempatan kolaborasi kepada siapa saja di (bidang) modest fashion untuk bersama-sama memajukan sektor modest fashion kita," kata Ita Rulin.

Menurut Ita, IN2MF hadir dalam dua acara di Paris untuk mempromosikan modest fashion Indonesia dan membuka peluang kerja sama dengan mitra dan pembeli dari ranah global.

Paris dikenal sebagai salah satu pusat mode dunia, sehingga menawarkan potensi pasar yang sangat besar untuk industri fesyen, termasuk busana Muslim yang dipamerkan oleh para desainer Indonesia.

"Kita ingin mempercepat agar sektormodest fashion kita benar-benar jadi pusat busana Muslim di dunia," kata Ita. IN2MF akan menampilkan keunggulan dan keragaman fesyen Indonesia, termasuk perkembangan terbaru dalam industri tersebut dan gaya hidup halal Indonesia ke pasar global.

Dengan mengintegrasikan tekstil dan budaya Indonesia ke dalam mode, IN2MF di Paris diharapkan dapat menawarkan pengalaman berbeda bagi industri mode global.

Menariknya, rangkaian acara IN2MF di Paris tidak hanya memamerkan koleksi pakaian dari desainer Indonesia, tetapi juga menggandeng salah satu desainer tamu asal Paris bernama Dalinda.

Hal ini dilakukan guna memperkenalkan kekayaan material fesyen Nusantara, salah satunya

penggunaan wastra atau kain tradisional, serta menaikkan jumlah produksi dan pembelian.

"Kenapa desainer asing kita ajak? Kalau targetnya IN2MF ini untuk menjual ke dunia, maka kita harus ajak juga desainer asing ke sini, silakan cicipi keindahan kain wastra Indonesia," sambungnya.

Sepakat dengan Ita, Advisory Indonesian Fashion Chamber (IFC) Ali Charisma mengatakan, pemilihan desainer lumayan panjang (yang akan diikutsertakan ke Paris), dan kita ingin Indonesia menjadi pusat modest fashion dunia.

Ali berharap seluruh karya yang ditampilkan dalam IN2MF dalam pameran di Salle Wagram dan trunk show "Who's Next" di Porte de Versailles dapat membuka peluang bisnis wholesale yang berkelanjutan dan memperkuat eksistensi karya industri modest fashion Indonesia.

Dengan demikian, fesyen Muslim Indonesia akan semakin dikenal dan diterima di pasar global. Sembilan desainer dan jenama Indonesia yang berkesempatan untuk mempresentasikan karyanya di pameran Paris telah melalui proses kurasi yang ketat, dan beberapa di antaranya merupakan anggota Indonesia Kreatif Syariah Ekonomi (IKRA) sektor fesyen.

Ada Itang Yunasz, Dian Pelangi, Wignyo, Batik Chic, Yece by Yeti Topiah, Dama Kara, Luvnic by Luffi, Brilianto, dan Jamilah x Prafito by Tujuh Bersaudara.

Sebagai informasi, IKRA merupakan program pengembangan usaha syariah secara holistik, termasuk pengembangan kapasitas,

penguatan nama jenama, penguatan marketing, dan penyediaan outlet pasar dalam dan luar negeri yang dikembangkan oleh Bank Indonesia.

Jenama yang telah menjadi anggota IKRA tersebut dikurasi ulang oleh Dewan IKRA bersama Bank Indonesia untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan produknya.

Koleksi busana Muslim Indonesia yang ditampilkan dalam gelaran di Paris tersebut menggunakan wastra Indonesia, seperti batik dan tenun.

Tidak hanya menonjolkan kekayaan budaya Indonesia, produk fesyen dari para desainer itu juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan dirancang dengan memerhatikan kualitas tinggi, memastikan ketahanan, serta mengurangi dampak lingkungan. "Kita pengen mengejar B2B nya dulu, kita siap membantu teman-teman menuju ke sana," tutup Ali. (nei,ist/dya)



## Dramaturgi Partai ... (dari Hal 1)

**DRAMATURGI** merupakan salah satu teori sosiologi yang dikemukakan oleh Erving Goffman. Dalam teori ini Goffman menggambarkan interaksi sosial sebagai pertunjukan sandiwaranya.

Strategi komunikasi dan pertunjukan simbolik yang dimainkan oleh elit politik itulah yang makin 'panas' hadapi Pilkada 2024.

PDIP misalnya yang sedang galau di Pilkada DKI Jakarta. Peluang mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, kembali bertarung dalam Pilgub Jakarta 2024 dari PDIP masih belum meyakinkan.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah meminta masyarakat untuk memberikan kesempatan dan waktu kepada partainya untuk berpikir sampai nanti mengumumkan siapa yang akan diusung sebagai calon Gubernur Jakarta.

"Bukan soal punya kans atau tidak Tapi, beri kami kesempatan, beri kami waktu, karena penutupan masih tanggal 29 (Agustus 2024) bukan hari ini," ucap Said Abdullah di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (27/8/2024).

Said menyiratkan bahwa bisa terjadi kemungkinan-kemungkinan dalam kontestasi Pilkada 2024 lantaran masih terus ada dinamika yang berkembang di lapangan.

"Bisa apa saja, bahkan Jawa Timur saya nyatakan Mbak Risma, tiba-tiba bukan Mbak Risma," tuturnya. "Kalau Jawa Timur Ibu Risma insyaallah confirmed," sambungnya.

Terkait dengan bakal calon wakil gubernurnya, Said menyebut saat ini masih dalam proses komunikasi. Yang intens adalah dengan PKB.

"Wakilnya masih dalam proses pembicaraan untuk sampai pada tahap menjadi cawagub mendampingi Mbak Risma," ujarnya.

Sejauh ini, PKB sudah mengenal-kan eks Ketua PWNU Jatim, KH Marzuki Mustamar sebagai sosok yang akan diusung di Jatim.

Disinggung soal batalnya PDIP mengumumkan Anies-Rano kemarin sebagai bagian dari kegalauan partai banteng moncong putih mengusung Anies, Ketua Badan Anggaran DPR RI ini meminta masyarakat tidak berspekulasi liar.

"Kalau kemarin kami tidak tahu apa-apa, kenapa kemudian ditarik-tarik ke Mas Anies kami jangan ditarik-tarik ke Mas Anies karena antara saya Pak Baskara (Ahmad Basarah, red) dan Mas Anies itu sebagai sahabat karib," tutupnya.

Berbeda dengan Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey yang memastikan partainya akan mengusung pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilgub Jakarta 2024.

"[PDIP jadinya Pramono-Rano] Iyo," kata Olly, Selasa (27/8/2024).

Olly menuturkan, pasangan itu akan mendaftar ke KPU besok, tidak ada deklarasi. "Iya besok daftar. Tadi Pramono yang telepon saya. Sudah dia ketemu Rano malam ini, insyaallah

besok jam 11 mereka daftar, begitu dia telepon saya," ucap dia.

Lebih jauh, Olly menegaskan PDIP tidak akan melakukan deklarasi sisa pasangan calon yang akan diusung dalam Pilkada serentak 2024.

"Eggak ada deklarasi. Itu sudah enggak ada deklarasi lagi sampai orang daftar-daftar," tandasnya.

Dalam situasi ini, pasangan Pramono Anung-Rano Karno bisa saja berubah di detik-detik akhir. Bahkan informasi yang diterima, Anies masih menjadi pertimbangan utama.

Pramono diketahui telah mengurus sejumlah surat syarat maju Pilgub. "Bahwa benar PN Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 telah mengeluarkan beberapa Surat Keterangan," kata Humas PN Jaksel, Djuyamto, dalam keterangannya, Selasa (27/8/2024).

"Surat Keterangan tersebut dikeluarkan atas permohonan dari Dr Pramono Anung untuk persyaratan pencalonan sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta," ujar Djuyamto.

"Permohonan langsung diproses pada hari itu juga adalah sesuai SOP Layanan Surat Keterangan di PN Jakarta Selatan," tambahnya.

### Mundur Massal Dewan Pakar PKS

Di sisi lain, sebanyak 28 anggota Dewan Pakar PKS mengumumkan mengundurkan diri sebagai kader PKS pada Senin (26/8/2024) kemarin. Salah satu anggota yang mundur itu adalah mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko.

Dalam video yang beredar di media sosial, Soenarko langsung mengumumkan sikap 28 anggota Dewan Pakar untuk mengundurkan diri dari PKS.

"Sehubungan hal di atas. Bersama ini kami mengundurkan diri dari keanggotaan PKS," kata Soenarko.

Soenarko awalnya menjelaskan mereka bergabung dengan PKS lantaran dianggap sebagai partai yang istikamah dalam memperjuangkan Indonesia yang lebih baik. Namun, ia mengatakan perkembangan baru-baru ini menunjukkan hal sebaliknya.

Soenarko mengatakan ada tiga alasan pihaknya mengundurkan diri dari PKS. Alasan pertama karena PKS telah mengumumkan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dianggap mengikuti Pilpres 2024 dengan curang.

Alasan kedua, sikap PKS yang mendukung Bobby Nasution di Pilgub Sumut. Baginya, sikap tersebut sama saja mendukung politik dinasti.

"Ketiga, Pilkada yang akan berjalan pada waktu yang akan datang, PKS kurang mendengarkan mayoritas aspirasi rakyat, tetapi keputusan yang terpengaruh oleh kepentingan elite partai," kata Soenarko.

Dihubungi terpisah, Ketua Dewan Penasihat PKS Tifatul Sembiring mengakui ada beberapa anggota Dewan Pakar PKS yang mundur. Namun, ia tak mempermasalahkan sikap mereka yang keluar dari PKS

tersebut.

"Iya, ada yang mundur dari total 250 anggota Dewan Pakar. Silakan saja, itu hak masing-masing," kata Tifatul Selasa (27/8/2024).

Tifatul pun enggan merespons lebih jauh terkait alasan 28 orang tersebut mundur dari PKS. Ia mengatakan hal demikian merupakan hak demokrasi masing-masing.

"Silakan saja, hak demokrasi masing-masing. Cocok dengan PKS, kita lanjut. Eggak cocok, monggo. Mungkin ada partai lain yang lebih baik. Asalkan kau bahagia," kata dia.

Sebelumnya Soenarko sempat dilantik oleh Presiden PKS Ahmad Syaikh sebagai anggota Dewan Pakar PKS di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, 17 Oktober 2023 lalu. Soenarko kala itu dilantik bersama 44 anggota dewan pakar PKS yang baru.

Terkait Pilkada, kabar terbaru menyebut PKS membatalkan dukungan kepada mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan komika Marshal Widiyanto pada Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel) 2024, untuk kemudian memberikannya kepada Ruhamaben dan Shinta Wahyuni Chairuddin sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangsel.

"DPTP PKS memutuskan untuk menarik rekomendasi/SK/Form B 1 KWK yg sebelumnya sudah diberikan kepada calon lain, dengan mengeluarkan dukungan resmi terbaru (SK dan Form B 1 KWK) pada Pilkada Tangsel kepada dua kader PKS, yaitu Ruhamaben-Shinta," kata Presiden PKS Ahmad Syaikh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Dia mengatakan bahwa pengalihan dukungan itu diputuskan setelah PKS mendengarkan aspirasi dari para kader dan masukan publik, terutama dengan adanya peluang yang dibuka oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah diakomodasi dalam Peraturan KPU (PKPU) sehingga PKS berkesempatan mengusung calon wali kota dan wakil wali kota Tangsel.

"Sebagaimana kita pahami dinamika politik yang luar biasa terjadi akhir-akhir ini adalah bentuk kepedulian kader partai dan publik dalam ruang demokrasi kita. Ada juga keputusan MK serta PKPU terbaru yang diterima oleh DPTP untuk dilaksanakan. PKS sebagai partai politik tunduk patuh pada konstitusi dan menghargai aspirasi kader dan masyarakat," tuturnya.

### Muktamar Tandingan 'Lawan' Cak Imin

Sementara itu, Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Lukman Edy mengklaim mendapat mandat dari ratusan DPC PKB untuk menggelar Muktamar di Jakarta pada 2-3 September mendatang.

Menurutnya, Muktamar PKB yang digelar di Bali beberapa waktu lalu cacat prosedur karena melanggar AD/ART partai.

"Kami menganggap muktamar di

Bali itu menjadi muktamar yang cacat prosedur, kemudian muktamar yang sesat, sehingga kami menganggap perlu dilakukan muktamar kembali yang sebenarnya, yang sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga, dan sesuai dengan UU tentang partai politik," kata Edy di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

"Terutama semangat pro demokrasi dan ada amanah dan pesan dari PBNU yang tidak diindahkan sama sekali oleh Cak Imin yaitu berkenaan dengan PKB harus kembali ke khittah tahun 1998," imbuh dia.

Ia mendorong tokoh-tokoh NU seperti Yenny Wahid hingga Khofifah untuk maju dalam Muktamar yang rencananya akan digelar pihaknya.

Edy mengatakan di kepemimpinan PKB saat ini juga banyak tokoh yang layak menjadi Ketua Umum.

"Misalnya ada ibu Khofifah, Yenny wahid, Saifullah Yusuf, Abdul Kadir Karding, Halim Iskandar bisa Jazilul Fawaid, Hanif Dhakiri, Ida Fauziah, banyak sekali anak-anak muda ada Adung, Gus Yaqut, banyak sekali kader-kader NU dan PKB yang mumpuni," katanya.

Edy mengaku bakal melapor terlebih dahulu ke PBNU soal rencana muktamar tersebut. Ia mengatakan muktamar direncanakan dibuka oleh PBNU dan ditutup oleh presiden.

Meski menyinggung presiden, ia membantah sudah ada obrolan dengan pihak istana soal rencana muktamar.

"Nanti kita lihat pertimbangan PBNU apakah tanggal yang kami ajukan tanggal 2-3 September itu secara teknis, secara prinsip kan sudah tidak jadi masalah..tapi kita akan konsultasinyang intensif dengan PBNU, karena gini, kami punya rencana, muktamar yang akan kita buat, dibuka oleh PBNU nanti ditutup oleh presiden," katanya.

Sebelumnya, dalam Muktamar PKB ke-6 seluruh DPW PKB di 38 provinsi sepakat menetapkan Cak Imin sebagai ketum PKB.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai bahwa balik badan partai-partai politik yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus masih akan terus terjadi di sisa tiga hari menjelang penutupan pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Menurut dia, partai-partai politik anggota KIM Plus pada akhirnya akan mengutamakan kadernya sendiri apabila mempunyai elektabilitas tinggi untuk bertarung pada Pilkada 2024.

"Saya kira banting setir semacam Golkar di Banten akan terjadi di berbagai tempat, terutama ketika kader terbaik partai tidak diusung dan diusung oleh partai yang lain," kata Adi, Selasa (27/8/2024).

"Saya menduga partai yang elektabilitas kadernya bagus tapi terpaksa bergabung dengan KIM ya satu per satu akan meninggalkan KIM, mengusung kader mereka sendiri," lanjut dia. (tro,ant,rls,wid/dya)

# Soal Pengalihan Kuota Haji 2024

## Pansus Haji Gali Peran Menteri Agama

**JAKARTA** - Panitia Khusus Hak Angket Haji (Pansus Haji) terus mencari bukti dugaan penyimpangan dan permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

Anggota Pansus Haji DPR, John Kenedy Azis, menggali peran Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam pengalihan kuota haji 2024. John menggali peran Yaqut kepada Kepala Urusan Haji Kementerian Agama di Arab Saudi, Nasrullah Jasam, dalam pemeriksaan, Selasa (27/8/2024)

Pansus Haji menghadirkan Nasrullah sebagai saksi. Dalam pemeriksaan tersebut, awalnya John bertanya mengenai pihak yang menandatangani memorandum of understanding (MoU) yang mengatur tentang kuota jemaah haji 2024. "Siapa yang bertanda tangan di MoU tersebut?" kata John bertanya kepada Nasrullah, Selasa (27/8/2024).

Nasrullah lantas menjawab bahwa MoU tersebut ditandatangani oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Penyelenggara Haji Arab Saudi. Isi MoU tersebut di antaranya mengenai penambahan kuota haji 2024 untuk Indonesia.

Nasrullah membacakan isi MoU tersebut. Di situ disebutkan bahwa kuota haji Indonesia pada musim haji 1445 Hijriah sebesar 241 ribu jemaah. Angka itu sudah termasuk tambahan kuota sebesar 20 ribu jemaah. Total kuota haji itu juga dirinci menjadi dua, yaitu jumlah haji haji reguler sebesar 213.320 dan jumlah jemaah yang datang dari perusahaan pariwisata dan dibawah pengawasan langsung kantor urusan haji sebanyak 27.680.

Setelah membacakan isi MoU tersebut, John bertanya lebih lanjut kepada Nasrullah. Politikus Partai Golkar ini menanyakan mengenai pesan Menteri Agama kepada anak buahnya dari hasil kesimpulan rapat antara Kementerian Agama dan DPR saat membahas kuota haji 2024. John hendak memastikan apakah pengalihan tambahan kuota haji 2024 itu dilakukan secara sepihak oleh Menteri Agama serta pengetahuan tentang aturan-aturannya.

John juga menanyakan inisiasi Kementerian Agama untuk mengalihkan tambahan kuota haji tersebut. "Draft itu (MoU), (apa) ada juga inisiasinya dari Kementerian Agama untuk menentukan jumlahnya?" kata John bertanya ke Nasrullah.

Namun, Nasrullah menjelaskan hal berbeda, yaitu mengenai proses penyepakatan draft MoU tersebut. Tidak puas dengan jawaban tersebut, John kembali mencecer Nasrullah dengan pertanyaan lanjutan. "Draft tersebut kan bertentangan dengan kesimpulan rapat dengan DPR. Apakah ada upaya itu disampaikan oleh Menag atau Dirjen Haji?"



Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji DPR RI memeriksa saksi-saksi. (Ilustrasi/ist)

Setelah ditanya berkali-kali, Nasrullah justru mengaku tidak mengetahuinya. "Saya tidak tahu," kata dia. Nasrullahh beralasan dirinya tidak terlibat dalam proses penyepakatan isi MoU tersebut serta tidak terlibat dalam rapat antara Kementerian Agama dan DPR. Ia mengatakan dirinya hanya berperan menyampaikan kebijakan Menteri Agama kepada Pemerintah Arab Saudi yang mengurus penyelenggaraan ibadah haji.

Pemeriksaan Pansus Haji ini masih terus berlanjut dengan pertanyaan anggota panitia khusus lainnya. Pansus Haji dibentuk untuk menggali dugaan pelanggaran dalam pengalihan 20 ribu tambahan kuota haji 2024, dari haji reguler ke haji khusus atau ONH Plus.

Pengalihan kuota haji tersebut diduga dilakukan secara sepihak oleh Kementerian Agama dan melanggar undang-undang. Sebab persentase kuota haji khusus 2024 melebihi ketentuan. Sesuai Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kota haji khusus maksimal sebesar delapan persen dari total kuota haji.

### Ditemukan Masyarakat Wanprestasi

Terpisah, Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 atau Pansus Angket Haji DPR RI Selly Andriany Gantina menyampaikan pihaknya menemukan di lapangan adanya masyarakat yang melakukan wanprestasi pada pelaksanaan Haji 2023, namun kembali dilibatkan pada 2024.

"Dari beberapa temuan di lapangan, ada masyarakat yang wanprestasi (melanggar kesepakatan), terbukti misalnya konsumsi yang selama ini kami temukan di lapangan pada tahun 2023 dia memang sudah wanprestasi, tapi di tahun 2024 masih dipakai juga," kata Selly.

Hal tersebut dia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket Haji bersama

pihak penyedia layanan haji bagi jemaah asal Indonesia itu.

"Bolehkah kami dari pansus mendapatkan data dari kontrak-kontrak yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, terutama Kemenag, karena kami sudah mendapatkan beberapa bukti ada beberapa masyarakat dan syarikah yang ternyata wanprestasi," ujar dia.

Menanggapi pertanyaan itu, Ketua Pansus Angket Haji Nusron Wahid dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa Selly berhak memperoleh data itu. Ia menjelaskan demi kepentingan penyelidikan, setiap pihak yang diminta data oleh Pansus wajib memberikan data itu.

"Didaftar saja dokumen apa saja yang dibutuhkan, yang Pansus butuhkan, nanti kita minta beliau kirim. Pada prinsipnya, demi kepentingan penyelidikan Pansus DPR, semua pihak yang diminta data wajib untuk memberikan. Itu perintah undang-Undang," ujar Nusron. (tro,rls,ant/dya)

